

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wilayah yang mempunyai keunikan dan keistimewaan yang khas di dunia. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 buah dan panjang garis pantai lebih dari 80.000 km merupakan jumlah pulau terbesar dan garis pantai terpanjang di dunia. Dari segi keaneka ragaman hayati menduduki peringkat ketiga setelah Brasilia dan Kolombia. Dari segi kegunungapian merupakan lokasi gunung api yang paling aktif di dunia dan merupakan pertemuan lempeng tektonik di dunia yang berpotensi menimbulkan bencana letusan vulkanik, gempa, dan tsunami. Pada posisi yang demikian Indonesia merupakan wilayah dengan predikat dilalui sabuk api atau *ring of fire*. Letusan Gunung Merapi yang tak kunjung reda, makin mempertegas predikat NKRI sebagai negara sabuk api.

Gunung Merapi terletak di perbatasan dua propinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, bertipe gunungapi strato dengan kubah lava, elevasi ± 2.911 m dpl dan mempunyai lebar ± 30 km (Bemmelen, 1949; Katili dan Siswamidjojo, 1994). Erupsinya paling aktif di Indonesia sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Sejarah erupsi G. Merapi dapat diketahui berdasarkan umur batuan yang berasal dari endapan hasil erupsi, awan panas, dan endapan lahar di bagian utara, selatan dan barat (Widiyanto dan A. Rahman, 2008). Erupsi G. Merapi sejak abad XVI hingga abad XX mengalami perubahan waktu istirahat dari 71 tahun menjadi 8 tahun, dengan jumlah kegiatan 7 kali menjadi 28 kali (Bronto 1996; Widiyanto dan A. Rahman, 2008). Aktivitas letusan G. Merapi terkini 12 Oktober – 5 November 2010 tergolong erupsi cukup besar dibandingkan erupsi tahun 1870, namun lebih kecil disbanding erupsi pada abad XVI. Jumlah material piroklastik hasil erupsinya ditaksir mencapai lebih dari 140 juta m³ (Tim Badan Litbang Pertanian, 2010).

Adanya erupsi Gunung Merapi mengakibatkan kerusakan dan kerugian material masyarakat di sector pertanian, peternakan, serta hortikultura yang ada di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Diprediksi dana yang diperlukan untuk pemulihan di sector pertanian lebih besar daripada yang digunakan pada dua wilayah pascagempa tahun 2006 yang lalu mencapai Rp. 3,7 triliun (Antara, 2010; Kompas, 2010). Letusan Gunung Merapi, mengakibatkan geyser abu vulkanik dengan berbagai ukuran dari yang sangat halus (abu) sampai kasar (krikil, kerakal, batu) di sejumlah wilayah dan telah membuat sector pertanian sangat terpuruk. Kerusakan itu terutama pada pertanian hortikultura yang berupa ribuan hektar perkebunan salah pondoh, kelapa, dan sayur-sayuran. Selain pertanian, kondisi serupa juga menimpa sector peternakan, seperti perikanan dan ayam pedaging maupun petelur. Selain dana yang besar saat pemulihan diseluruh sector akibat letusan Gunung Merapi, waktu pemulihan juga dikhawatirkan akan lebih panjang daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Kegiatan pengurangan resiko bencana alam dapat dikelola dengan baik apabila sifat dan karakter dari lahan dapat dinilai dengan baik. Kegiatan pengurangan resiko bencana alam adalah satu-satunya yang dapat dilakukan untuk menekan sekecil mungkin kerugian akibat sesuatu kejadian bencana alam (Sartohadi, 2010). Pembuatan zonasi daya dukung lahan kawasan lereng Gunung Merapi pasca erupsi 2010 dimaksudkan untuk mengurangi resiko bencana dan menekan sekecil mungkin kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya zonasi tersebut diharapkan petani dan peternak di kawasan lereng Gunung Merapi dapat hidup selaras dengan alam.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 pada ketentuan umum disebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Dengan berpijak dari pengertian tersebut bila dikaitkan dengan

kondisi adanya bencana erupsi merapi tentunya akan adanya gangguan terhadap aspek ketersediaan pangan bagi masyarakat seluruh kabupaten Provinsi DIY bagi daerah-daerah yang terkena dampak hujan abu, maupun banjir lahar dingin.

Hal penting dalam kebijakan Ketahanan Pangan adalah perlunya memperkuat peran pemerintah daerah dalam melakukan fungsi koordinasi antar pelaku di bidang ketahanan pangan baik pemerintah maupun swasta sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program ketahanan pangan, khususnya hubungan antara Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKPP, dan Dinas teknis (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kesehatan, Perindustrian Perdagangan, dan lain-lain). Kebutuhan ini sangat terasa saat terjadinya letusan Gunung Merapi pada Bulan Oktober-November 2010 yang lalu. Pada saat ratusan ribu penduduk harus mengungsi, dan mereka meninggalkan tanah garapan dan ternaknya, maka muncul tugas pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka yang biasanya selama ini mampu dipenuhi oleh mereka sendiri.

Profil kondisi lahan sebelum dan sesudah erupsi Gunung Merapi 2010 menurut data Dinas Pertanian Provinsi DIY sebagai berikut:

Tabel 1. .1

Profil Kondisi Lahan sebelum dan sesudah Erupsi Merapi 2010

No	Kecamatan/ Desa	Kondisi Sebelum Erupsi	Kondisi Pasca Erupsi
1	Cangkringan	Luas lahan Total 13.491 ha Untuk:	Diperkirakan 825 ha tidak bisa ditanami dalam waktu tertentu karena terlanda awan panas
	Glagahharjo		
	Kepuhharjo		
	Umbulharjo		
2	Pakem	Sawah dan tegal 46,14% Pekarangan 27,21% Lainnya 26,65%	
	Hargobinangun		
	Purwobinangun		
3	Wonokerto		
	Girikerto		
Jumlah			

(Sumber : Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2010)

Profil kondisi kerusakan dan kerugian bidang Peternakan dan Pertanian sebelum dan sesudah erupsi Gunung Merapi 2010, menurut data DKP Provinsi DIY.2010, sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Kerusakan dan Kerugian Bidang Peternakan

Jenis usaha tani	Sebelum Erupsi	Sesudah Erupsi	
		Kerusakan	Kerugian
Ternak sapi perah	5.800 ekor	Mati 275 ekor	Terlantar 2.000-3.000 ekor
Susu sapi	69.000 liter/hr	Kehilangan 3.300 liter/hr	Produksi turun 8.000-12.000 liter/hr
Kebun rumput	7,5/m ² = 70-80 ton/ha/bln	Belum diidentifikasi	Belum diidentifikasi

(Sumber : DKP Provinsi DIY.2010)

Penelitian tentang perencanaan tata guna lahan penting untuk dilakukan, mengingat pasca erupsi Gunung Merapi, pasti banyak perubahan yang terjadi di lereng Gunung Merapi. Kondisi tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan Tata Guna Lahan Lereng Gunung Merapi Paska Erupsi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi lahan lereng Gunung Merapi paska erupsi ?
2. Bagaimanakah perencanaan tata guna lahan lereng Gunung Merapi paska erupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi lahan lereng Gunung Merapi paska erupsi.
2. Untuk mengetahui perencanaan tata guna lahan lereng Gunung Merapi paska erupsi.

D. Manfaat Penelitian

Analisis perencanaan tata guna lahan lereng Gunung Merapi paska erupsi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk:

1. Identifikasi tingkat kerusakan lahan paska erupsi Gunung Merapi.
2. Perumusan kebijakan terhadap lahan lereng Gunung Merapi paska erupsi yang terintegrasi di tingkat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Saran, data dan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.